

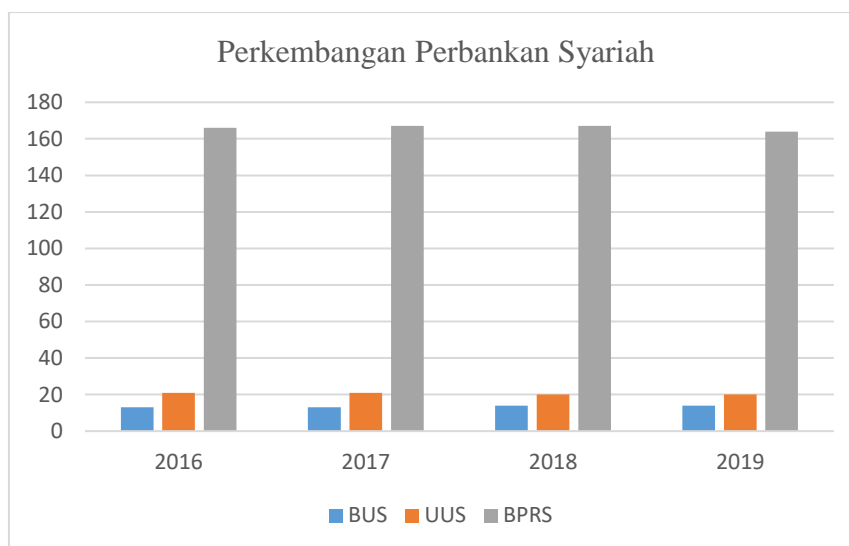
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang beroperasi sejak tanggal 1 Mei 1992. Pertumbuhan perbankan syariah sampai dengan Maret 2020, jumlah perbankan syariah di Indonesia sudah mencapai 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perkembangan yang pesat ini didukung dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Berdasarkan data Globalreligiousfutures, jumlah penduduk Indonesia pada 2010 yang beragama Islam (muslim) sebanyak 209,12 juta jiwa dan diprediksi pada tahun 2020 akan bertambah menjadi 263,92 juta jiwa dan meningkat menjadi 256,82 juta jiwa pada 2050. Tentu dengan banyaknya penduduk beragama Islam menyebabkan adanya pertumbuhan permintaan masyarakat terhadap sistem perbankan yang sesuai dengan syariat Islam dan terbebas dari unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam Islam seperti riba, maisir, ghoror, ikhtiar, dan lain sebagainya. Berikut ini grafik perkembangan perbankan syariah di Indonesia 4 tahun terakhir.

Gambar 1. 1 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia



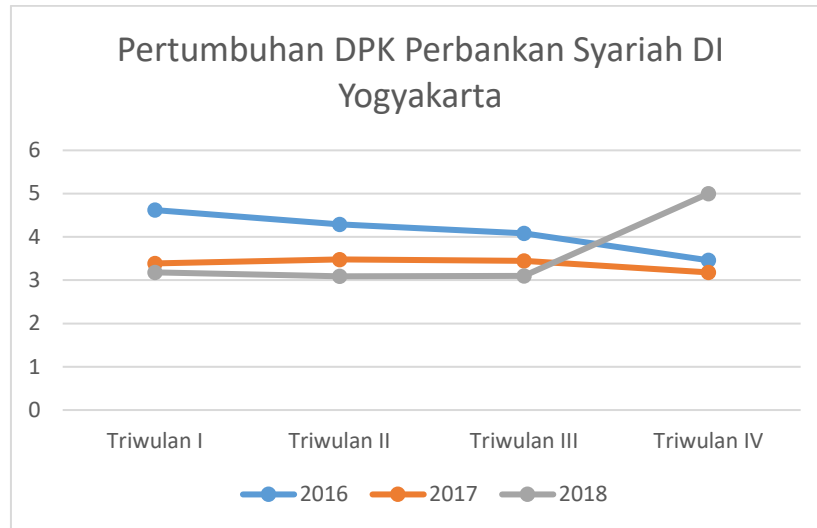
Sumber: Data OJK

Perbankan syariah sesuai UU RI No. 10 Tahun 1998 yaitu bank umum melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perbankan syariah sebagai lembaga intermediary financial. Hal ini dikarenakan fungsinya yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat. Kegiatan bank dalam mengumpulkan dana disebut kegiatan funding. Sedangkan kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank disebut financing atau landing. Maka dapat diaktakan fungsi bank sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara pihak surplus kepada pihak minus. Jabaran tentang penggunaan dana di bank syariah dijalankan sesuai dengan konsep dan system perbankan syariah.

Indikator pertumbuhan perbankan syariah dapat dilihat dari segi dana pihak ketiga, aset dan penyaluran pembiayaan. Dana pihak ketiga merupakan salah satu indikator pertumbuhan perbankan syariah. DPK bisa diibaratkan sebagai darah pada tubuh manusia, tanpa adanya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga suatu lembaga perbankan syariah akan merasakan lesu dan tidak bergairah pada tubuhnya. Oleh karena itu, perbankan syariah sangat perlu memperkuat dalam penghimpunan DPK agar struktur dana dapat menunjang ekspansi pembiayaan serta pengembangan bisnis & layanan transaksi untuk seluruh segment baik nasabah secara individual maupun korporasi/perusahaan.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana simpanan yang relatif mudah untuk didapatkan karena bersumber dari masyarakat baik muslim maupun non muslim pada produk giro, tabungan dan deposito yang terdapat di perbankan syariah menggunakan akad wadi'ah dan mudharabah. Perbankan syariah memanfaatkan atau mengelola dana tersebut untuk ditempatkan pada sektor-sektor tertentu yang menghasilkan pendapatan bagi perbankan dan perbankan dapat memberikan bagi hasil atau bonus untuk dana simpanan masyarakat tersebut. Berikut ini pertumbuhan DPK perbankan syariah di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2016-2018.

Gambar 1. 2 Pertumbuhan DPK Perbankan syariah DI Yogyakarta



Sumber: BI

Dari grafik diatas dapat diketahui bagaimana pertumbuhan DPK perbankan DI Yogyakarta tahun 2016-2018. Dimana pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan DPK perbankan syariah ini mengindikasikan kepercayaan masyarakat pada perbankan syariah di Indonesia. Semakin tinggi pertumbuhan DPK perbankan syariah tentu mengindikasikan masyarakat semakin percaya pada perbankan syariah, begitu pula sebaliknya. Menurut Sindi Puspitasari, A Jajang W. Mahri, dan Suci Aprilliani Utami (2020) pada penelitiannya tingkat inklusi keuangan syariah Tahun 2015-2018 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Dari 33 provinsi di Indonesia, D.I Yogyakarta termasuk kategori sedang dengan nilai aksesibilitas 1,28. Nilai aksesibilitas merupakan dimensi yang menggunakan rasio jumlah DPK perbankan syariah dalam jutaan rupiah per jumlah penduduk dewasa provinsi dengan usia 15 tahun keatas. Sehingga nilai tersebut dapat mengetahui jumlah individu yang memiliki rekening di perbankan syariah.

Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan DPK perbankan syariah DI Yogyakarta, baik faktor internal pada perbankan sendiri maupun faktor eksternal dari masalah makroekonomi. Dimana perbankan syariah masih dipandang tidak memiliki perbedaan dengan bank konvensional ketika menghadapi situasi eksternal. Temuan Chapra (2008) bahkan secara tegas menyebutkan bahwa perbankan syariah masih sangat rentan dalam menghadapi kondisi global. Sehingga menarik untuk diteliti lebih jauh mengenai pengaruh faktor makroekonomi terhadap DPK.

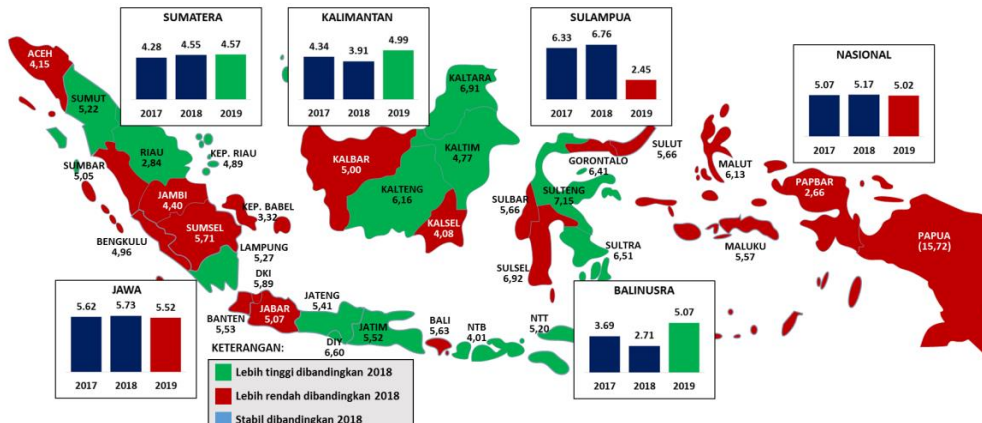
Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang menemukan pengaruh faktor makroekonomi terhadap tingkat simpanan dana di Bank Syariah, seperti penelitian Bambang Prasetya, Syamsurijal Tan dan Arman Delis (2015) menjelaskan apa saja factor-faktor yang mempengaruhi dalam pertumbuhan DPK perbankan syariah tahun 2008-2012. Berdasarkan hasil analisisnya terdapat informasi Suku Bunga perbankan konvensional, Equivalen rate, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Outlet secara bersama-sama berpengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan DPK Perbankan Syariah. Selain itu, pada penelitian Tryo Andhika (2018) memberikan hasil penelitian bahwa variabel BI Rate, Inflasi dan PDRB Perkapita berpengaruh terhadap DPK di Kabupaten Banyumas 2008-2015. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan DPK perbankan cenderung dipengaruhi oleh masalah-masalah faktor makroekonomi. Faktor-faktor makroekonomi yang diperkirakan mempengaruhi pertumbuhan dana pihak ketiga yaitu PDB/PDRB, Inflasi dan nilai tukar rupiah.

Dalam pembahasan makroekonomi cenderung terkait isu-isu yang bersifat makro(luas) seperti jumlah agregat ekonomi, laju pertumbuhan produksi nasional, suku bunga, pengangguran, dan inflasi. (Nur rianto, 2010: 25). Pembahasan tentang faktor

makroekonomi terhadap pertumbuhan DPK sangat penting bagi regulator karena alasan sebagai berikut : a) Makroekonomi dapat membantu regulator dalam memecahkan masalah resesi yang dihadapi suatu perekonomian b) Makroekonomi dapat pula membantu menentukan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. c) Makroekonomi dapat memberikan solusi alternatif mempertahankan inflasi tetap berada pada tingkat yang rendah dan stabil. d) Makroekonomi juga dapat menjelaskan tentang perubahan dalam suatu kebijakan itu mempengaruhi sektor real dan sektor keuangan.

Pertumbuhan ekonomi menurut Jojohadi Kusumo merupakan suatu proses peningkatan produksi atas barang dan jasa dalam perekonomian. Sehingga pertumbuhan ekonomi merupakan suatu masalah makro ekonomi jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara keseluruhan tahun 2019 tetap berdaya tahan di tengah kinerja perekonomian dunia yang melambat. Ekonomi nasional tumbuh 5,02% (yoy) kendati sedikit melambat dibandingkan tahun 2018. Capaian pertumbuhan secara nasional tersebut ditopang oleh kinerja ekonomi daerah yang meningkat terutama Sumatera, Kalimantan, dan Balinusra. Permintaan domestik masih menjadi penopang ekonomi di seluruh wilayah, meski tumbuh lebih lambat. Permintaan domestik yang masih baik di berbagai wilayah didukung terjaganya daya beli masyarakat didukung program perluasan bantuan sosial, penyaluran dana desa, serta dukungan inflasi yang rendah dan stabil. Di Sulampua, kenaikan permintaan domestik juga didorong oleh investasi. Di sisi lain, penyerapan belanja pemerintah daerah terindikasi lebih rendah dibandingkan periode tahun 2018.

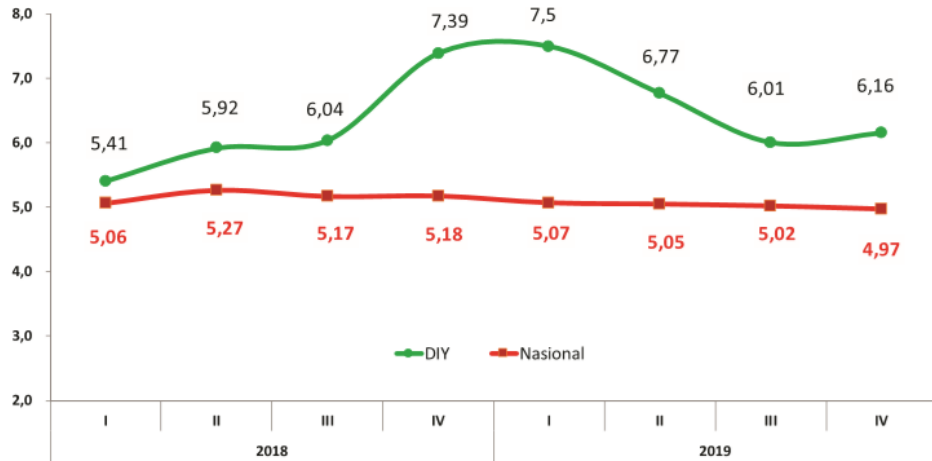
Gambar 1. 3 Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia



Sumber: BI

Perumbuhan ekonomi Indonesia jika dilihat secara kumulatif dapat dikatakan tumbuh, namun apabila jika dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi secara regional, pulau jawa menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga terjadi ketimpangan pendapatan khususnya antar pulau di Indonesia. Dalam data dua tahun terakhir laporan tahun 2018-2019, dapat dilihat rata-rata pertumbuhan perekonomian Provinsi DI Yogyakarta 6.60% (yoy) menunjukkan tingkatan yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional maupun Jawa secara agregat, yang tumbuh masing-masing sebesar 4,97% (yoy) dan 5,34% (yoy). Berikut grafik detail pertumbuhan ekonomi nasional dan DIY.

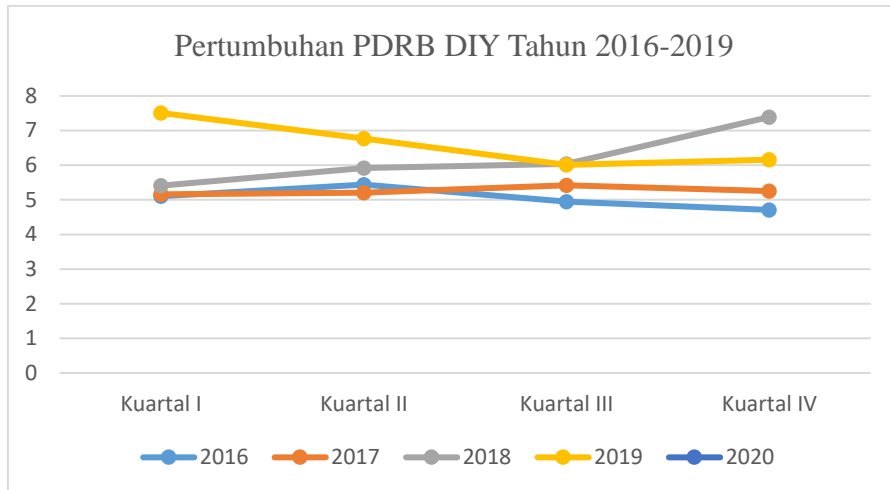
Gambar 1. 4 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan DI Yogyakarta



Sumber: BPS DIY

Indikator ekonomi yang meliputi pertumbuhan/perkembangan ekonomi, struktur ekonomi serta produktifitas pekerja disebut Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk wilayah provinsi dan dibawahnya. PDRB merupakan jumlah nilai tambah dari seluruh unit usaha yang beroperasi dalam suatu wilayah. Besaran dari PDRB dapat dilihat dengan hitungan satuan unit uang yang berdasarkan pada harga tahun yang menjadi patokan dasar. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa pada satu waktu tertentu sebagai dasarnya. PDRB atas dasar harga konstan ini disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Sehingga mampu mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan yang ada di masyarakat, melalui perhitungan tingkat kenaikan produk domestik regional bruto (PDRB) atas harga konstan. Berikut ini daftar PDRB atas harga konstan selama 4 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai tahun 2019 di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gambar 1. 5 Pertumbuhan PDRB DIY



Sumber: Data BI

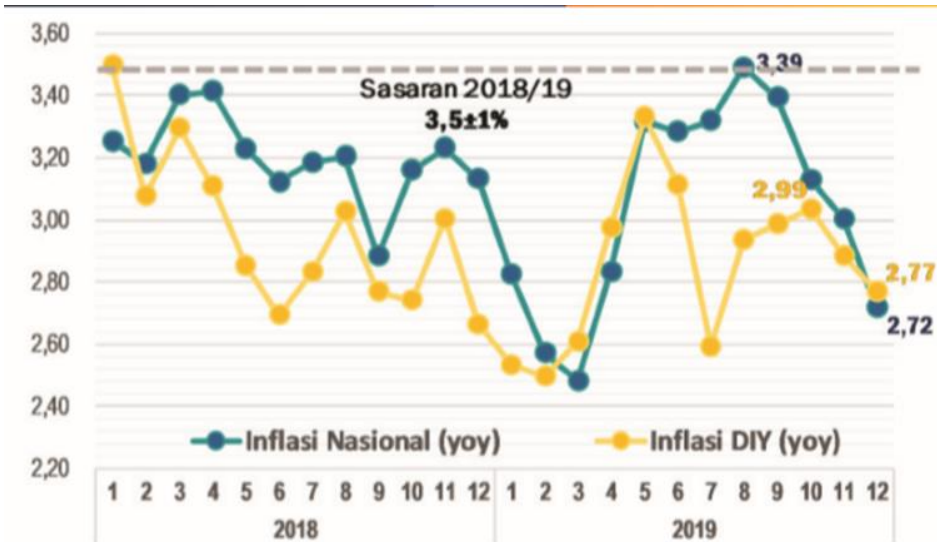
Data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi DIY selama periode 2016-2019 secara rata-rata mencapai 5,77 persen per tahun, dengan pertumbuhan masing-masing tahun sebesar 5,05 persen (2016); 5,26 persen (2017); 6,20 persen (2018); dan 6,60 persen (2019). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 (6,60%), sebaliknya pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2016 (5,05%).

Menurut Sukirno (2004:17) PDRB suatu daerah merupakan sebuah ukuran dalam pencapaian kegiatan perekonomian suatu daerah. Naik dan turunnya pertumbuhan PDRB menunjukkan tingkat kemakmuran masyarakat pada wilayah tersebut. Peningkatan ini jelas dikarenakan adanya tambahan pendapatan masyarakat sehingga konsumsi masyarakat dan keinginan untuk menabung atau investasi juga meningkat. Sehingga terdapat perputaran uang yang membuat dana dari masyarakat terdapat peningkatan. Sehingga terdapat pengaruh antara produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap

pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan syariah di suatu daerah. Proses pertumbuhan ekonomi yang terjadi di DIY selama periode 2006-2019 memberikan dampak pada pertumbuhan DPK di perbankan syariah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Yenti Afrida (2018) yang menunjukkan bahwa selain pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan PDB, inflasi dan Nilai kurs US dolar terhadap rupiah berpengaruh terhadap dana pihak ketiga perbankan syaria'ah di Indonesia.

Masalah makroekonomi selain pertumbuhan ekonomi yaitu terkait dengan tingkat inflasi. inflasi dapat mengurangi hasrat masyarakat untuk menabung atau menyimpan uangnya dalam bentuk deposito, jika muncul ekspektasi masyarakat terkait tingkat return yang lebih rendah dibanding tingkat inflasi. Realisasi inflasi Indonesia pada tahun 2019 di seluruh daerah mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional $3,5\%+1\%$. Inflasi IHK nasional pada 2019 tercatat $2,72\%$, lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang sebesar $3,13\%$, didukung oleh penurunan inflasi di sebagian besar daerah. Perkembangan inflasi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2018-2019 cenderung rendah dibawah nasional dan stabil. Inflasi DIY 2019 relatif terkendali yakni tercatat $2,77\%$ (yoy). Capaian inflasi ini sedikit lebih tinggi dibanding realisasi inflasi DIY 2018 yakni $2,66\%$ (yoy) maupun capaian inflasi nasional 2019 yakni $2,72\%$ (yoy). Berikut ini grafik pertumbuhan inflasi di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018-2019.

Gambar 1. 6 Pertumbuhan Inflasi Nasional dan DI Yogyakarta



Sumber: BI

Selain inflasi, penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat (Dollar AS) mampu menyebabkan capital outflow atau pelarian modal dana masyarakat luas keluar negeri. Hal ini dikarenakan semakin meningkat nilai tukar Dollar AS maka akan berdampak ke naiknya permintaan Dollar, sebaliknya permintaan uang domestik akan turun. Dengan asumsi jika sesuatu barang itu ditukar dengan barang lain maka akan terjadi perbandingan nilai tukar antara keduanya. Nilai tukar yang semacam harga didalam pertukaran tersebut. Demikian pula sama dengan pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, akan terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Perbandingan nilai tersebut kurs (exchange rate) (Douglas,2006: 157).

Gambar 1. 7 Gambar Nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS



Sumber: Investing.com

Dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa nilai tukar rupiah untuk setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Faktor yang mempengaruhi tingkat nilai tukar rupiah salah satunya yaitu permintaan dan penawaran akan valuta asing. Penawaran dan permintaan valuta asing timbul karena adanya hubungan internasional dalam perdagangan barang, jasa, maupun modal, sehingga untuk menyelesaikan transaksi perlu menukarkan suatu mata uang domestik dengan valuta asing, dan sebaliknya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, faktor-faktor makroekonomi memiliki peran tersendiri didunia perbankan syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga, ditetapkan judul pada penelitian ini adalah “Pengaruh PDRB DIY, inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2018”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh antara PDRB DIY, Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga Perbankan Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2018?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh antara PDRB DIY, Inflasi, dan Nilai Tukar Rupiah dengan pertumbuhan dana pihak ketiga Perbankan Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini yaitu semoga dapat memberikan sumbangsih bagi literatur untuk penelitian selanjutnya dan sebagai bahan pembelajaran/diskusi serta dapat dikembangkan dengan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna bagi regulator dalam menyusun dan melakukan kebijakan yang berkaitan dengan perbankan syariah.

b. Bagi Perbankan syariah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait faktor-faktor makroekonomi yang berpengaruh terhadap penghimpunan Dana Pihak Ketiga Perbankan

Syariah, sehingga mampu dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan perusahaan.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bagian dari pembelajaran dan evaluasi dari setiap ilmu yang didapatkan baik dari dalam ruang perkuliahan ataupun di luar ruang perkuliahan.

E. Sistematika penulisan

Penelitian ini akan terbagi menjadi 5 bagian. Adapun kelima bagian tersebut meliputi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Bagian ini akan memuat dan menguraikan penelitian terdahulu, teori yang digunakan dengan prinsip relevan, representatif, serta mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bagian ini akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan sampel, jenis/sumber data, definisi operasional variabel serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan berisi pembahasan serta interpretasi mengenai hasil yang didapatkan seperti hasil pengolahan data yang akan di elaborasi dengan teori-teori yang digunakan atau penelitian-penelitian terkait.

BAB V PENUTUP

Bagian ini akan berisi kesimpulan, saran, serta rekomendasi dari hasil penelitian yang didapatkan untuk mendapatkan sebuah hasil yang *conclusive*.